



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II - 2025

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
<i>HIGHLIGHT</i> KINERJA	2
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
1.1. LATAR BELAKANG	8
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	8
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	10
1.4. ISU STRATEGIS	10
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA	13
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN	14
2.3. PERJANJIAN KINERJA	14
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	15
2.5. METODE PENGUKURAN	15
BAB III	17
AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI	34
3.3. REALISASI ANGGARAN	40
3.4. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	50
BAB IV	51
PENUTUP	51
4.1. KESIMPULAN	51
4.2. SARAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kategori Capaian Indikator Kinerja.....	15
Tabel 1. 2 Predikat Nilai Kinerja Organisasi	16
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I	18
Tabel 3. 2 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU I	19
Tabel 3. 3 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 2	20
Tabel 3. 4 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 4	21
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi TW I dengan Capaian Tahunan IKU 5	22
Tabel 3. 6 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 6	22
Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 9	24
Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 10	25
Tabel 3. 9 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 11	26
Tabel 3. 10 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 12	26
Tabel 3. 11 Perbandingan realisasi triwulan I dengan target tahunan IKU 13	27
Tabel 3. 12 Perbandingan realisasi triwulan I dengan target tahunan IKU 14	28
Tabel 3. 13 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 15	29
Tabel 3. 14 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 16	30
Tabel 3. 15 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 17	30
Tabel 3. 16 Perbandingan realisasi triwulan I dengan target tahunan IKU 18	31
Tabel 3. 17 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 23	33
Tabel 3. 18 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan	35
Tabel 3. 19 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Triwulan I 2025	42
Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis	43
Tabel 3. 21 Range Tingkat Efisiensi	44
Tabel 3. 22 Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Merauke	9
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Merauke	10
Gambar 3. 1 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja	40

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Loka POM di Kabupaten Merauke dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat pada periode triwulan II tahun anggaran 2025.

Penyusunan laporan kinerja interim Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja triwulan II merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja pada periode triwulan II tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Loka POM di Kabupaten Merauke telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di Papua Selatan dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan kinerja tersebut tercermin melalui pencapaian sasaran strategis. Adanya perubahan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 kami jadikan sebagai tantangan yang mampu memicu pencapaian kinerja yang lebih baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim periode triwulan II Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada periode

triwulan berikutnya dalam upaya mewujudkan secara nyata tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai Institusi Pengawas Obat dan Makanan di wilayah kerja Papua Selatan.

Merauke, 21 Juli 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke,

The image shows a circular official stamp of the Badan POM (Indonesian Food and Drug Administration) for the Merauke Regency. The stamp contains the text "LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN", "BADAN POM", and "DI KABUPATEN MERAUKE". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Minarto, S.Farm., Apt.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Merauke Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis selama triwulan II. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Merauke menyajikan hasil pengukuran terhadap 8 sasaran kegiatan dengan 23 indikator kinerja. Untuk periode triwulan II, nilai kinerja organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Merauke 90% dengan predikat baik.

Capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan selama periode triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian kinerja sebesar 98,47%.
2. Menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah masing-masing UPT dengan capaian kinerja sebesar 100,10%.
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian kinerja 120%.
5. Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian kinerja 0%.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian kinerja 100%.
7. Layanan publik UPT yang prima belum dapat dilakukan penilaian karena nilai capaian kinerja akan dihitung di triwulan IV.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal belum dapat dilakukan penilaian karena nilai capaian kinerja pada 3 indikator yang mendukung sasaran strategis tersebut dihitung secara tahunan pada akhir tahun.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke didukung dengan anggaran awal sebesar Rp3.927.558.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) APBN Tahun 2025. Namun, dari besaran pagu tersebut sebesar Rp1.320.426.000,- (33,62%) tidak dapat digunakan karena termasuk ke dalam anggaran yang diblokir secara mandiri dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.093.103.366,- atau 27,83% dari total pagu anggaran tahun 2025.

HIGHLIGHT KINERJA



Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 ini, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keamanan pangan serta mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK dan memperhatikan Informasi Nilai Gizi (ING). Kegiatan yang menyasar komunitas sekolah terutama guru dan siswa-siswi tersebut diharapkan juga membentuk perilaku pangan yang baik.



Pada tanggal 29 April 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke menyelenggarakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) di Balai Serbaguna Kelurahan Karang Indah. Pelatihan merupakan tahap kedua dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Desa yang dihadiri oleh Kader Masyarakat, Kader Keluarga, dan Kader Sekolah Kelurahan Karang Indah. Pelatihan ini bertujuan mengedukasi kader tentang pentingnya mencegah keracunan pangan, stunting dan keamanan pangan.

Melalui pelatihan ini, diharapkan kader dapat menjadi perpanjangan tangan dalam mewujudkan desa yang sehat dan aman pangan. "Dari diri sendiri, keluarga, masyarakat-kita wujudkan pangan aman untuk generasi unggul!".



Loka POM di Kabupaten Merauke mengadakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berupa sosialisasi Cek KLIK sebelum berbelanja di SMPBP DDI Al munawwaroh dan MA Al-Munawwaroh Merauke. Kegiatan ini merupakan pemberdayaan masyarakat agar cerdas dalam memilih obat dan makanan yang tepat dan aman serta masyarakat menjadi paham dan tentunya lebih bijak lagi dalam memilih obat, makanan dan minuman sebelum dikonsumsi.



Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada sarana industri pangan olahan, Loka POM di Kabupaten Merauke menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi UMKM. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman bagi pelaku usaha pangan olahan dalam penerapan prinsip CPPOB sekaligus memberikan penjelasan mengenai alur proses dalam sertifikasi IP CPPOB, sehingga dapat menghasilkan produk yang aman, bermutu dan berdaya saing.



Pada tanggal 14 Mei 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke menyelenggarakan Bimbingan Teknis Komunitas Kader. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Desa yang dihadiri oleh Komunitas Guru, Komunitas Ritel, Komunitas Pangan Siap Saji, Komunitas Ibu Rumah Tangga, Komunitas Remaja Putra/Putri, dan Komunitas Pangan Olahan yang berasal dari lingkungan Kelurahan Karang Indah. Materi disampaikan oleh para Kader Keamanan Pangan Kelurahan Karang Indah.



Pada tanggal 21 Mei 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Kader Keamanan Pangan Sekolah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan. Kegiatan Bimtek ini dihadiri oleh 6 Kader Sekolah yang masing-masing berasal dari 2 sekolah yaitu SMP YPPK Yoanes XXIII dan SD Inpres Polder Merauke.

Kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keamanan pangan kepada komunitas sekolah untuk mendukung kemandirian sekolah dalam mewujudkan keamanan pangan.



Rabu tanggal 28 Mei 2025 bertempat di Pasar Wamunggu dilakukan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar oleh Kader Keamanan Pasar. Kegiatan yang merupakan salah satu dari tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) ini diharapkan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan.



Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan Jemput bola pendampingan pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Registrasi Nomor Izin Edar (NIE) Pangan Industri Kecil Mikro (IKM) di Kabupaten Merauke. Kegiatan ini disambut antusias oleh pelaku usaha karena dirasakan dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan.



Kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa di Kelurahan Karang Indah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025. Kegiatan yang memfasilitasi para kader keamanan pangan desa sejumlah 5 (lima) orang untuk melakukan audit ke sarana-sarana berupa sarana rumah tangga, pelaku usaha, dan ritel. Audit dilakukan dalam rangka mengawal keamanan pangan di Kelurahan Karang Indah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan bimbingan teknis kepada komunitas desa.



Loka POM di Kabupaten Merauke berkomitmen untuk mencegah stunting di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Komunikasi (KIE) yang bertemakan stunting kepada Masyarakat. Materi yang disampaikan terkait Pangan yang Aman, Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) dan Aplikasi BPOM Mobile. Loka POM di Kabupaten Merauke mengajak seluruh peserta untuk terus melakukan edukasi Keamanan Pangan mulai dari remaja putri, ibu hamil dan ibu menyusui untuk pencegahan stunting karena “Cegah Stunting itu Penting.”



Komitmen Bersama untuk Melindungi Masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak aman membutuhkan sinergi dari berbagai pihak salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Merauke. Bersama Loka POM di Kabupaten Merauke dan Kejaksaan Negeri Merauke, penanganan perkara hukum di bidang Obat dan Makanan terus diperkuat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam melindungi masyarakat Merauke dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan sinergi yang kuat, perlindungan terhadap masyarakat dapat terwujud lebih optimal. Bersama, kita wujudkan Merauke yang sehat dan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam melaksanakan peraturan tersebut, perlu juga memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke di masa yang akan datang.

Laporan kinerja disusun untuk mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien. Penyusunan laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke, yang kemudian dievaluasi atau dinilai. Laporan kinerja berisi penjelasan atas setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati antara Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 8 Sasaran Strategis dan 23 indikator kinerja utama (IKU), dimana masing - masing IKU memiliki target pencapaian setiap bulan. Target pencapaian inilah yang menjadi output kegiatan yang harus dicapai Loka POM di Kabupaten Merauke selama tahun 2025. Hasil akhir dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di tahun 2025 agar dapat memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke ke arah yang lebih baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

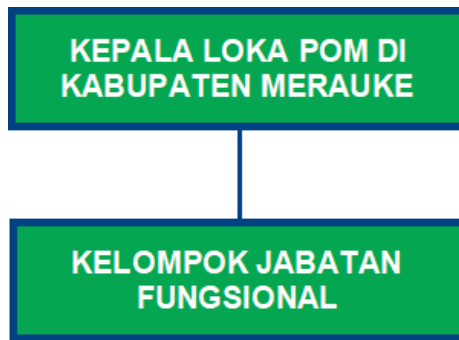
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke mencakup Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Loka POM di Kabupaten Merauke terletak di Ibu Kota Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke. Transportasi dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Boven Digoel dapat menggunakan pesawat udara yang membutuhkan waktu sekitar 45 menit atau melalui jalur darat yang membutuhkan waktu kurang lebih 9 jam. Untuk menjangkau Kabupaten Mappi dapat menggunakan pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Sedangkan untuk menjangkau Kabupaten Asmat dapat menggunakan pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan kemudian dilanjutkan menggunakan jalur laut selama kurang lebih 1 jam.



Gambar 1. 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Merauke

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang bertugas melaksanakan pengawasan di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM Loka POM di Kabupaten Merauke terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Merauke

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Merauke dalam rangka melaksanakan tugas.

1.4.1. Isu Internal

1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.
2. Pembentukan UPT di tingkat Kabupaten/Kota
Dengan terbentuknya UPT di kabupaten/kota ini akan meningkatkan jangkauan pengawasan Obat dan Makanan sampai ke pelosok, dan juga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait Obat dan Makanan. Penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan juga akan semakin menjangkau seluruh pelosok khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Selain itu dengan terbentuknya UPT BPOM di tingkat kabupaten/kota juga akan mempermudah koordinasi dengan lintas sektor terutama pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota,

hal ini akan meningkatkan percepatan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi.

3. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan 30 Juni 2025 persentase pemenuhan analisis beban kerja (ABK) Loka POM di Kabupaten Merauke baru mencapai 77,42%. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai sesuai dengan tugas dan jabatan belum dapat terpenuhi sehingga dapat mengakibatkan inefisiensi alur kerja. Saat ini sebagian besar pegawai bertanggung jawab untuk beberapa pekerjaan diluar tugas utamanya. Untuk itu sangat dibutuhkan penambahan pegawai terutama di bidang dukungan manajemen agar beban kerja dapat terdistribusi merata dan dapat mengoptimalkan kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke. Selain belum terpenuhinya persentase ABK secara maksimal, SDM di Loka POM di Kabupaten Merauke juga masih memiliki kesenjangan kompetensi yang cukup besar. Beberapa pegawai masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam mengerjakan tugas pokoknya. Kesenjangan kompetensi ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketersediaan anggaran dan keterbatasan kuota untuk mengikuti pelatihan. Seringkali peserta pengembangan kompetensi dibatasi 1 orang per unit kerja setiap tahun, sehingga pegawai harus menunggu cukup lama untuk dapat mengikuti pengembangan kompetensi yang dibutuhkan.

4. Sarana dan Prasarana

Tanah tempat bangunan kantor dan laboratorium Loka POM di Kabupaten Merauke saat ini masih berstatus milik pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh hibah tanah tersebut agar dapat menjadi milik BPOM RI. Karena status tanah yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah maka sulit untuk melakukan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi standar pelayanan yang optimal. Lokasi kantor dan unit layanan pengaduan konsumen berada cukup jauh dari pusat kota menyebabkan masyarakat cukup kesulitan untuk mendapatkan pelayanan karena harus menempuh jarak yang cukup jauh.

5. Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke saat ini sudah berjalan cukup baik namun masih ditemukan beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah belum ada SDM yang berkompeten dalam permasalahan teknologi informasi, sistem IT yang belum terintegrasi yang dapat mengakibatkan inefisiensi pekerjaan, dan seringnya terjadi masalah dari penyedia layanan komunikasi seperti putusnya kabel optik laut yang mengakibatkan hilangnya jaringan seluler dan internet di wilayah Merauke yang berimbas pada terhambatnya kinerja organisasi.

1.4.2. Isu Eksternal

1. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

2. Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005 - 2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Sejalan dengan ini timbul banyak usaha - usaha Mikro di daerah termasuk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dan rata - rata UMKM tersebut merupakan UMKM di bidang pangan, obat tradisional, dan kosmetik.

3. Kondisi Geografis

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke mencakup 4 kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Akses ke kabupaten tersebut sebagian besar menggunakan pesawat perintis dengan jadwal penerbangan yang terbatas, sehingga untuk melakukan pengawasan ke daerah-daerah tersebut sangat bergantung pada ketersediaan transportasi. Beberapa daerah juga masih sangat sulit dijangkau karena terbatasnya sarana transportasi dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

4. Sinergitas Kelembagaan

Sinergitas antarlembaga sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Merauke sangat memerlukan kerja sama dan bantuan dari pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam memberikan edukasi bagi masyarakat dan memerangi kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan rencana 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Badan POM 2025-2029. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP. Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengharuskan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Di dalam Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke 2025-2029 diusung visi BPOM untuk rencana strategis 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas Utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah

produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada Lampiran I.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas,

fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Perjanjian kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran II.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung. RAPK Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat dalam lampiran III.

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025. Rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 110\%$	
Baik	$90\% \leq x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x < 90\%$	
Kurang	< 60%	

Tabel 1. 1 Kategori Capaian Indikator Kinerja

Nilai kinerja organisasi (NKO) diukur dari hasil penghitungan total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata). Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 predikat, sebagai berikut:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna		
Istimewa	$>100\%$			
Baik	$80\% < x \leq 100\%$			
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$			
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$			
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 60\%$			

Tabel 1. 2 Predikat Nilai Kinerja Organisasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi diperoleh dari hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama pada Loka POM di Kabupaten Merauke untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi yang diperoleh pada triwulan II terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Pada triwulan II tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 90% dengan predikat kinerja Baik.

Capaian kinerja untuk masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel berikut:

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	99,44	122,39%
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0%
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	95	126,67%
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	27,78	46,30%
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0	0%
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65%
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	100	104,44%
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125%
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,20	99,35	108,94%
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	10,67	10,67	100%

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,48	86,83	100,40%
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75	100%
Jumlah desa pangan aman	75	75	100%
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	75	100%
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	60	120%
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	0	0%
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100%
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-
Persentase implelementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50	100%

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I

3.1.1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Pada triwulan II, target indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 81,25 dengan realisasi sebesar 99,44 maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah 122,39% dengan predikat “tidak dapat disimpulkan”. Bila dibandingkan dengan target tahunan yaitu sebesar 81,25, capaian

kinerja untuk indikator ini masih berada pada nilai 122,39% yang termasuk ke dalam kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
81,25	81,25	99,44	122,39%	122,39%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 2 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU I

Sampai dengan akhir triwulan II telah dilaksanakan sampling terhadap 53 sampel sesuai dengan perencanaan. Pemilihan kategori sampel dilakukan berdasarkan kemampuan uji laboratorium, sehingga masih mungkin terjadi perubahan perencanaan disesuaikan dengan kondisi laboratorium penguji. Untuk meminimalisir kendala yang terjadi pada saat pengiriman sampel, kegiatan sampling dilakukan lebih awal yaitu 15 hari kerja sebelum tenggat penerimaan sampel di laboratorium penguji yaitu di tanggal 5 setiap bulan berjalan.

Untuk pelaporan melalui SIPT dilakukan maksimal 5 HK setelah pelaksanaan sampling agar data dapat tersampaikan ke balai penguji secara tepat waktu dan apabila ada kendala dapat ditindaklanjuti segera. Untuk sampel bulan Juni terdapat sampel yang belum dapat dilaporkan melalui SIPT yaitu obat kategori lain-lain (*water for injection*) Sampel tersebut belum dapat diuji sterilitas karena balai penguji sedang kehabisan reagen sehingga perlu menunggu 1-2 bulan untuk melakukan pengujian.

Capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan diperlukan penyesuaian anggaran dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

- kesesuaian target sampel UPT;
- kesesuaian parameter uji;
- ketepatan pengambilan kesimpulan;
- ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
- ketepatan pelaporan sampling dan pengujian.

Sampai dengan bulan Maret 2025, capaian kinerja indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 133,33% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jika dibandingkan dengan target tahunan, capaian indikator ini juga sebesar 133,33% yang termasuk ke dalam kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
75	75	100	133,33%	133,33%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 3 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 2

Sesuai dengan perencanaan petugas telah melaksanakan sampling sesuai target sebanyak 25 sampel. Sampel kemudian dikirim ke regional Jayapura untuk dilakukan pengujian. Pemilihan parameter disesuaikan dengan pedoman sampling dan kemampuan uji regional Jayapura. Sampling diprioritaskan di sarana yang memiliki *track record* TMS (tidak memenuhi syarat), sampel yang belum disampling di tahun sebelumnya, dan mengacu pada daftar riwayat TMS sampel periode sebelumnya. Pelaporan melalui SIPT dilaksanakan maksimal 5 HK setelah pelaksanaan sampling. Apabila ditemukan sampel yang TMS penandaan, maka akan dilaporkan melalui SIPT.

Dalam pelaksanaan kegiatan sampling di luar wilayah Kabupaten Merauke, petugas cukup terkendala karena varian produk yang terbatas dan juga kuantitas produk yang sangat sedikit. Sehingga kegiatan sampling sebagian besar dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Merauke.

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampai dengan akhir triwulan II belum ditemukan kasus KLB keracunan pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Loka POM di Kabupaten Merauke akan melaksanakan sampling KLB apabila ditemukan KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Dengan adanya kebijakan relaksasi anggaran untuk beberapa program prioritas nasional, target sampel PIRT dikembalikan menjadi 4 sampel yang sebelumnya hanya ditargetkan 2 sampel. Sampai dengan Juni 2025, capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 126,67% dengan realisasi sebesar 95 dari target 75. Bila dibandingkan dengan

target tahunan, capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori tercapai/melampaui dengan nilai capaian sebesar 126,67%.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
75	75	95	126,67%	126,67%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 4 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 4

Sampai akhir triwulan II, 4 sampel yang menjadi target seluruhnya telah disampling dan diuji. Dengan demikian diperkirakan sampai dengan akhir target untuk indikator ini telah tercapai. Dalam pelaksanaan kegiatan sampling terdapat kategori sampel PIRT yang seharusnya disampling sesuai pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, namun sampel tersebut tidak dapat ditemukan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke karena kurangnya variasi produk. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan untuk perubahan kategori sampling yang awalnya kategori minuman serbuk botanical, menjadi kategori bumbu PIRT.

Variasi kategori pangan yang beredar di wilayah Papua Selatan terbatas dan masa kedaluarsa yang singkat hambatan dalam penentuan kategori sampling.

5. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Sampai dengan triwulan II, Loka POM di Kabupaten Merauke telah mengeluarkan 18 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dan 10 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Pada triwulan II, target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 60%, namun baru dapat terpenuhi sebesar 27,78% sehingga nilai capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 46,30% dengan kategori cukup. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 30,53% dan termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAAN TW	CAPAAN TAHUNAN	KATEGORI
60	91	27,78%	46,30%	30,53%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi TW II dengan Capaian Tahunan IKU 5

Capaian yang rendah pada indikator ini dikarenakan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan, pelaku usaha membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga seringkali melewati batas waktu yang diberikan untuk melaksanakan perbaikan yaitu 21 HK. Selain itu, waktu pemeriksaan sarana yang dilaksanakan di akhir triwulan sehingga tindak lanjut dari pelaku usaha belum diterima.

Untuk mencapai kinerja sesuai target, akan dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam membuat laporan CAPA (*Corrective Action, Preventive Action*) dan secara berkala melakukan monitoring kemajuan tindakan perbaikan yang dilakukan pelaku usaha. Selain upaya pendampingan, juga akan dilakukan koordinasi dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke) yang melaksanakan pemeriksaan sarana menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari BPOM agar tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dapat dijadikan data dukung untuk tindak lanjut atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke.

6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sampai dengan akhir triwulan II 2025, kinerja indikator ini belum direalisasikan sehingga capaian kinerja untuk indikator ini masih 0% yang termasuk ke dalam kategori kurang. Bila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 100, capaian kinerja indikator ini juga masih berada pada nilai 0% yang termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAAN TW	CAPAAN TAHUNAN	KATEGORI
100	100	0	0%	0%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 6 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 6

Pada triwulan II, belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi. Pemeriksaan akan dilaksanakan di triwulan III terhadap 1 sarana UMOT di Kabupaten Merauke. Keterbatasan sarana produksi Sediaan Farmasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya capaian untuk indikator ini.

7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Perhitungan capaian indikator ini dilihat dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang diperiksa.

Pada triwulan II telah dilaksanakan pemeriksaan sarana produksi terhadap 5 sarana produksi pangan olahan. Dengan hasil capaian indikator sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target tahunan yaitu 85, capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai 117,65%.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
85	85	100	117,65%	117,65%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 7

Pemeriksaan sarana sampai dengan semester I tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Sarana produksi pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke sebagian besar berskala UMKM sehingga cukup kesulitan untuk memenuhi aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Sampai dengan bulan Juni 2025,, Loka POM di Kabupaten Merauke telah melaksanakan pengawasan terhadap 30 sarana distribusi Sediaan Farmasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Target tahunan untuk indikator ini adalah sebesar 95,75% dan sampai dengan akhir triwulan II 2025 telah direalisasikan sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target triwulan II dan tahunan, kinerja pada indikator ini telah mencapai 104,44%.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
95,75	95,75	100	104,44%	104,44%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 8

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa sarana yang menjadi target pemeriksaan hanya beroperasi di luar jam kerja sehingga petugas cukup kesulitan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana tersebut.

9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
- Ketepatan waktu pelaporan
- Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Pada triwulan II 2025, realisasi kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100, apabila dibandingkan dengan target triwulan II yaitu sebesar 80 maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 125% dan termasuk ke dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 125% dengan kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
80	80	100	125%	125%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 9 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 9

10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi

Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Pada triwulan II 2025, pengawasan iklan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dengan realisasi kinerja sebesar 99,35% dari target 91,20 sehingga nilai capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 108,94% yang termasuk ke dalam kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 108,94% dan termasuk ke dalam kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
91,20	91,20	99,35	108,94%	108,94%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 10 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 10

Pengawasan iklan akan dilakukan sesuai renlak yang telah disusun dan berpedoman pada pedoman pengawasan iklan di setiap komoditi. Untuk meminimalisir keterlambatan pelaporan, pengawasan iklan dilakukan dan diinput di SIPT setiap akhir bulan untuk target pengawasan bulan berjalan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan iklan adalah media iklan untuk komoditi obat tradisional dan suplemen kesehatan selain internet dan website lainnya cukup sulit ditemukan. Media luar ruang untuk iklan komoditi pangan dan kosmetik terbatas dan kurang bervariasi. Sedangkan untuk iklan komoditi pangan, target proporsi media penyiaran terikat pada waktu dan tanggal pengawasan sehingga iklan yang diperoleh terbatas.

11. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

SKL tingkat 2 dan 1 (Laboratorium Loka POM di Kab/Kota) terdiri 3 komponen yaitu:

- Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
- Standar Peralatan;
- Standar Kompetensi Laboratorium.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan standar kemampuan laboratorium loka dan balai POM kabupaten/kota tingkat 1 dan tingkat 2, nilai pemenuhan SKL Loka POM di Kabupaten Merauke pada triwulan II adalah 10,67, sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100% bila dibandingkan dengan target triwulan dan termasuk ke dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini

adalah sebesar 97% dan termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
10,67	11	10,67	100%	97%	 Akan tercapai

Tabel 3. 11 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 11

Dikarenakan adanya perubahan tools perhitungan pada awal tahun, pada triwulan II telah diajukan revisi target bulanan menjadi 10,67. Realisasi telah sesuai dengan simulasi perhitungan SKL.

Untuk pengembangan kompetensi pegawai telah dikoordinasikan dengan Balai Besar POM di Jayapura agar petugas Loka POM di Kabupaten Merauke dapat mengikuti Pelatihan Verifikasi Antara dan Evaluasi Kalibrasi yang diadakan BBPOM di Jayapura. Untuk pemenuhan alat laboratorium telah dilaksanakan pengadaan melalui *e-catalog* walaupun harga sebelumnya mengalami peningkatan, revisi anggaran telah dilakukan agar kegiatan tetap dapat berjalan.

12. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE
- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Sampai dengan akhir triwulan II, realisasi nilai efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Merauke adalah 86,83 sehingga capaian kinerja untuk indikator tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan adalah 100,40% dan telah memenuhi target nilai 86,48 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 100,40% dan termasuk dalam kategori akan tercapai.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
86,48	86,48	84,04	97,18%	97,18%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 12 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 12

Selama semester II telah dilaksanakan KIE melalui berbagai media, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial dan media cetak. Dari hasil survey yang diperoleh, dari 4 indikator yang dinilai. Secara keseluruhan nilai indeks total telah tercapai sesuai target. Namun nilai indeks KIE Tatap muka masih belum tercapai. Responden masih kurang memahami dan mengingat pesan-pesan keamanan Obat dan Makanan yang telah disampaikan melalui KIE dan belum sepenuhnya dapat menerapkan pesan-pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Di periode selanjutnya pesan-pesan KIE akan dibuat lebih menarik dan menggunakan bahasa yang lebih ringan dan mudah dipahami masyarakat. Petugas juga akan lebih aktif dalam mengajak masyarakat untuk menerapkan keamanan Obat dan Makanan dalam kehidupan sehari-hari.

13. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Sampai dengan triwulan II telah dilaksanakan berbagai tahapan kegiatan untuk program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan seperti Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah, Sosialisasi Keamanan Pangan, dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut maka capaian kinerja indikator ini adalah 100% dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 3.750% dengan kategori tercapai/melampaui. Capaian kinerja tahunan cukup besar karena target tahunan menggunakan jumlah sekolah yang akan diintervensi, sedangkan target di setiap triwulan dihitung menggunakan persentase proses dari setiap tahapan kegiatan.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
75	2	75	100%	3750%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 13 Perbandingan realisasi triwulan II dengan target tahunan IKU 13

Sekolah yang ditargetkan melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan sekolah yang dipilih berdasarkan koordinasi dan merupakan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Merauke. Dalam pelaksanaan tahapan kegiatan tidak ditemukan kendala yang berarti namun dibutuhkan keaktifan dari kader sekolah yang telah ditunjuk agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan maksimal.

14. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Sampai dengan triwulan II telah dilaksanakan kegiatan Sampai dengan triwulan II telah dilaksanakan berbagai tahapan kegiatan untuk program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan seperti Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan di Desa. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut maka capaian kinerja indikator ini adalah 100% dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 7.500% dengan kategori tercapai/melampaui. Capaian kinerja tahunan cukup besar karena target tahunan menggunakan jumlah desa yang akan diintervensi, sedangkan target di setiap triwulan dihitung menggunakan proses dari setiap tahapan kegiatan.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
75	1	75	100%	7500%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 14 Perbandingan realisasi triwulan II dengan target tahunan IKU 14

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, tahapan kegiatan mengalami penyesuaian dan perubahan. Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan keaktifan dan respon yang baik dari kader keamanan pangan yang telah ditunjuk agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan maksimal. Untuk periode selanjutnya tahapan kegiatan akan tetap dilaksanakan sesuai timeline kegiatan.

15. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Sampai dengan triwulan II telah dilaksanakan kegiatan Sampai dengan triwulan II telah dilaksanakan berbagai tahapan kegiatan untuk program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan seperti Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut maka capaian kinerja indikator ini adalah 100% dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 7.500% dengan kategori tercapai/melampaui. Capaian kinerja tahunan cukup besar karena target tahunan menggunakan jumlah pasar yang akan diintervensi, sedangkan target di setiap triwulan dihitung menggunakan persentase proses dari setiap tahapan kegiatan.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
75	1	75	100%	7500%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 15 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 15

Target awal merupakan target yang ditetapkan sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, tahapan kegiatan mengalami penyesuaian dan perubahan. Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan keaktifan dan respon yang baik dari kader keamanan pangan yang telah ditunjuk agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan maksimal. Untuk periode selanjutnya tahapan kegiatan akan tetap dilaksanakan sesuai timeline kegiatan.

16. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan

UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Pada triwulan II telah dilaksanakan pendampingan terhadap UMKM Pangan Olahan serta Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Capaian kinerja indikator ini pada triwulan II adalah 120% dengan kategori baik. Bila dibandingkan dengan target tahunan

capaian kinerja indikator ini masi termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras dengan nilai capaian sebesar 70,59%.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAAN TW	CAPAAN TAHUNAN	KATEGORI
50	85	60	120%	70,59%	 Akan tercapai

Tabel 3. 16 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 16

Dalam melaksanakan pendampingan kepada UMKM, ditemukan beberapa kendala yaitu:

- Semua UMKM yang didampingi tidak memiliki alat pengolah data sehingga kesulitan untuk pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi.
- UMKM kurang aktif dan inisiatif dalam proses pendampingan
- Efisiensi anggaran membuat beberapa tahapan pendampingan UMKM tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Efisiensi anggaran juga menyebabkan UMKM yang didampingi hanya UMKM yang berada di dalam Kabupaten Merauke dan tidak dapat dilaksanakan di luar Kabupaten Merauke.
- Beberapa pelaku usaha kesulitan biaya untuk pengujian produk risiko tinggi.

Untuk menindaklanjuti dan meminimalisir kendala yang terjadi, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Fasilitator membantu langsung UMKM dalam pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi.
- Fasilitator lebih aktif dalam menginformasikan progress pendampingan kepada UMKM.
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersisa dalam melakukan pendampingan UMKM.

17. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan.

Realisasi kinerja pada triwulan II adalah 0 dengan capaian kinerja juga 0%. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 0% dan termasuk dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAAN TW	CAPAAN TAHUNAN	KATEGORI
15	75	0	0%	0%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 17 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 17

Sampai dengan triwulan II telah dilaksanakan berbagai kegiatan mulai dari kegiatan intelijen sampai wasmalitrik (pengawasan, pengamatan,

penelitian, dan pemeriksaan). Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut belum ditemukan kasus yang berpotensi untuk dinaikkan menjadi perkara. Untuk periode berikutnya kegiatan intelijen akan dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Merauke, terutama untuk wilayah yang belum pernah dijangkau. Petugas juga akan lebih aktif berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen BPOM dan lintas sektor terkait untuk melakukan pengawasan peredaran penyalahgunaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

18. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjeakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b) Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Capaian kinerja indikator ini pada triwulan II adalah sebesar 100% dengan realisasi sesuai target yaitu 50% dan termasuk ke dalam kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target tahunan yaitu 90, capaian kinerja indikator ini adalah 55,56% yang masih termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
50	90	50	100%	55,56%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 18 Perbandingan realisasi triwulan II dengan target tahunan IKU 18

Laporan analisis kejahatan diambil dari data kerawanan kejahatan selama 1 tahun yang kemudian dibuat menjadi tren analisis. Pada triwulan ini masih dilaksanakan pengumpulan informasi melalui patroli siber, intelijen dan wasmalitrik. Dalam melaksanakan patroli siber kadang ditemukan akun yang sulit untuk ditelusuri dan dilakukan

verifikasi. Untuk periode selanjutnya akan dilaksanakan perluasan sumber data untuk patroli siber dan melaksanakan kegiatan sesuai target perencanaan.

19. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- Profesionalitas SDM (25%);
- Sarana Prasarana (18%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- Inovasi (12%).

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai akan diperoleh di triwulan IV tahun 2025.

Pelaksanaan pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Merauke akan dilaksanakan sesuai rencana aksi, diantaranya adalah:

- Menetapkan standar pelayanan untuk seluruh jenis layanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke melibatkan unsur masyarakat dalam proses penyusunannya, serta dilakukan moneyv.
- Melakukan publikasi Standar Pelayanan pada (1)Media Cetak/Non Elektronik (2) Media Elektronik (TV, layar monitor, e-Kiosk, link publikasi, dan sejenisnya); (3) Media sosial (Facebook, Instagram, Twitter,
- Whatsapp, dan sejenisnya); (4) Website Loka POM di Kab. Merauke; (5) Aplikasi yang bisa diunduh melalui PPID BPOM Mobile; dan (6) SIPPN.

20. Nilai AKIP UPT BPOM

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP akan dikeluarkan di TW IV setelah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Utama.

21. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas

hasil pelaksanaan anggaran. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Nilai kinerja anggaran akan diperoleh diakhir tahun.

Dengan adanya kebijakan efisiensi dan relaksasi anggaran, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Loka POM di Kabupaten Merauke mengalami perubahan cukup banyak dan berpengaruh terhadap capaian kinerja. Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan target kinerja yang akan dicapai.

22. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang dilaksanakan di semester II sehingga nilai akan diperoleh di akhir tahun.

23. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Pada triwulan II, capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100% dengan kategori baik. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja yang diperoleh adalah 50% yang termasuk dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
50	100	50	100%	50%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 19 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 23

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke akan melaksanakan rencana aksi RB secara rutin dan melaksanakan pelaporan secara tepat waktu.

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

3.2.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan I

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM*** RENCANA AKSI YANG BELUM	TIMELINE	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-					
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-					
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	-					
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-					
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan kepada pelaku usaha belum ditindaklanjuti seluruhnya.	Melakukan follow up secara berkala terkait rekomendasi perbaikan yang telah diberikan kepada pelaku usaha dan melaksanakan pendampingan dalam pembuatan laporan CAPA (<i>corrective action preventive action</i>).	TW II		Melakukan follow up secara berkala terkait rekomendasi perbaikan yang telah diberikan kepada pelaku usaha dan melaksanakan pendampingan dalam pembuatan laporan CAPA (<i>corrective action preventive action</i>).	TW III	Beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan di TW I telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, namun untuk rekomendasi yg di keluarkan di TW II blm ditindak lanjuti karena tenggat waktu tindak lanjut masuk ke TW III
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai timeline perencanaan	TW II		Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai timeline perencanaan.	TW III	Pemeriksaan sarana direncanakan di TW III.
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-					
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-					
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-					
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	-	-					
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Target triwulan masih menggunakan tools lama, sedangkan perhitungan realisasi telah menggunakan tools yang baru sehingga target triwulan 1 terlalu kecil yaitu 1 apabila dibandingkan dengan realisasinya (3) sehingga capaian terhadap target adalah 300.	Melakukan penyesuaian perubahan cara perhitungan berdasarkan target SKL awal untuk capaian Triwulan berikutnya.	TW II	Melakukan penyesuaian perubahan cara perhitungan berdasarkan target SKL awal untuk capaian Triwulan berikutnya.			Target telah direvisi sesuaikan tools perhitungan yang baru dan telah dilaksanakan revisi target RAPK.

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM***		
						RENCANA AKSI YANG BELUM	TIMELINE	
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Hasil survey menunjukkan nilai terendah terdapat pada indikator manfaat dan pemahaman audiens, hal ini disebabkan karena tidak semua responden dapat mengingat dan memahami pesan-pesan KIE dan belum dapat menerapkan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari.	Pesan-pesan KIE akan dibuat lebih menarik dengan menggunakan bahasa yang ringan, mudah dimengerti serta mengajak masyarakat untuk lebih memahami manfaat penerapan keamanan Obat dan Makanan dalam keseharian.	TW II	Pesan-pesan KIE akan dibuat lebih menarik dengan menggunakan bahasa yang ringan, mudah dimengerti serta mengajak masyarakat untuk lebih memahami manfaat penerapan keamanan Obat dan Makanan dalam keseharian.			Indeks Efektivitas KIE Media dan Total tercapai
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-					
14	Jumlah desa pangan aman	-	-					
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-					
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	UMKM yang didampingi tidak memiliki alat pengolah data sehingga kesulitan untuk pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi; UMKM kurang aktif dan inisiatif dalam proses pendampingan; Efisiensi anggaran membuat beberapa tahapan pendampingan UMKM tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.	Fasilitator membantu langsung UMKM dalam pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi; Fasilitator lebih aktif dalam menginformasikan progress pendampingan kepada UMKM; Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dalam melakukan pendampingan UMKM.	TW II		Fasilitator membantu langsung UMKM dalam pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi; Fasilitator lebih aktif dalam menginformasikan progress pendampingan kepada UMKM; Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dalam melakukan pendampingan UMKM.	TW III	UMKM yang didampingi tidak memiliki alat pengolah data sehingga kesulitan untuk pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi; UMKM kurang aktif dan inisiatif dalam proses pendampingan; Efisiensi anggaran membuat beberapa tahapan pendampingan UMKM tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Hasil dari kegiatan intelijen dan wasmalitrik belum ada yang berpotensi untuk diproses lebih lanjut menjadi perkara.	Merencanakan kegiatan intelijen di luar wilayah kab. Merauke terutama wilayah yang belum pernah dijangkau; melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Intelijen dan lintas sector terkait untuk melakukan pengawasan peredaran penyalahgunaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Merauke.	TW II	Merencanakan kegiatan intelijen di luar wilayah kab. Merauke terutama wilayah yang belum pernah dijangkau; melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Intelijen dan lintas sector terkait untuk melakukan pengawasan peredaran penyalahgunaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Merauke.			Pembinaan dari Deputi IV untuk pengawasan peredaran penyalahgunaan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka Merauke. Intelijen telah dilaksanakan di Eci, Mappi yang merupakan wilayah yang selama ini belum dapat dijangkau.
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	-	-					
19	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-					
20	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-					

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM***		
						RENCANA AKSI YANG BELUM	TIMELINE	
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Adanya efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.	Menyesuaikan perencanaan kegiatan dengan efisiensi anggaran dan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan agar target tetap tercapai.	TW II		Menyesuaikan perencanaan kegiatan dengan efisiensi anggaran dan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan agar target tetap tercapai.	TW III	
22	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-					
23	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	-	-					

Tabel 3. 20 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

3.2.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan II

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM***		
						RENCANA AKSI YANG BELUM	TIMELINE	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pada bulan Juni terdapat sampel yang belum dapat dilaporkan melalui SIPT karena pengujian belum dilakukan disebabkan adanya reagen yang habis dan membutuhkan waktu indent sekitar 1-2 bulan.	Melakukan perubahan target untuk TW III dan target tahunan. Melakukan monitoring pengujian sampel yang belum dilaporkan karena reagen habis (BBPOM Makassar) Berkoordinasi dengan balai regional apabila ada <i>force major</i> dalam sampling dan pengujian.	TW III				
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Varian sampel/produk di kabupaten luar Merauke terbatas, kuantitas sampel terbatas.	Melakukan usulan kenaikan target tahunan dan triwulan berikutnya agar realisasi tercapai sesuai kriteria. Melaksanakan sampling di Kabupaten Merauke yg memiliki lebih banyak varian sampel/produk.	Sepanjang tahun				
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Belum ada ditemukan kasus KLB keracunan pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.	Koordinasi dengan lintas sektor terkait	Sepanjang tahun				

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM***	TIMELINE	
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat kategori sampel PIRT yang seharusnya disampling sesuai pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, namun sampel tersebut tidak dapat ditemukan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke karena kurangnya variasi produk. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan untuk perubahan kategori sampling yang awalnya kategori minuman serbuk botanikal, menjadi kategori bumbu PIRT	Sampling PIRT direalisasikan sesuai target tahunan.	TW III				
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Pelaku usaha membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga seringkali melewati batas waktu yang diberikan untuk melaksanakan perbaikan yaitu 21 HK. Selain itu, waktu pemeriksaan sarana yang dilaksanakan di akhir triwulan sehingga tindak lanjut dari pelaku usaha belum diterima.	Akan dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam membuat laporan CAPA (<i>Corrective Action, Preventive Action</i>) dan secara berkala melakukan monitoring kemajuan tindakan perbaikan yang dilakukan pelaku usaha. Selain upaya pendampingan, juga akan dilakukan koordinasi dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke) yang melaksanakan pemeriksaan sarana menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari BPOM agar tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dapat dijadikan data dukung untuk tindak lanjut atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke.	Sepanjang tahun				
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Hanya terdapat 1 sarana untuk sediaan farmasi OT (kapsul albumin) yang masuk di perencanaan kegiatan TW III.	Melaksanakan pemeriksaan di TW III	TW III				
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sarana produksi pangan sebagian besar berskala UMKM sehingga agak sulit untuk melakukan pemenuhan aspek-aspek CPPOB.	Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai perencanaan	Sepanjang tahun				
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Beberapa sarana yang merupakan target pemeriksaan tahun ini yang termasuk risiko tinggi namun hanya beroperasi di luar jam kerja sehingga petugas kesulitan untuk memeriksa.	Melaksanaan pemeriksaan sesuai perencanaan dan ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut	Sepanjang tahun				
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana berjalan sesuai perencanaan.	Melaksanaan pemeriksaan sesuai perencanaan dan ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut	Sepanjang tahun				

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM***	TIMELINE	
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Media iklan untuk komoditi obat tradisional dan suplemen kesehatan selain internet dan website lainnya cukup sulit ditemukan. Media luar ruang untuk iklan komoditi pangan dan kosmetik terbatas dan kurang bervariasi. Untuk iklan komoditi pangan, target proporsi media penyiaran terikat pada waktu dan tanggal pengawasan sehingga iklan yang diperoleh terbatas.	Pelaporan dilaksanakan sesuai perencanaan dan melaporkan tepat waktu.	Sepanjang tahun				
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Beberapa alat laboratorium yg direncanakan akan diadakan tahun ini harganya meningkat 2 kali lipat dari perencanaan sehingga memerlukan revisi anggaran. Relaksasi anggaran hanya terjadi di UPT, tetapi di unit pengampu tidak. Terdapat pelatihan luring yang direncanakan namun dari unit pengampu tidak ada sehingga anggaran pelatihan tidak terpakai.	1) Melakukan revisi anggaran untuk pemenuhan alat laboratorium 2) Berkoordinasi dengan BBPOM di Jayapura tentang Pelatihan Verifikasi Antara dan Evaluasi Kalibrasi yang akan di selenggarakan pada tanggal 23 Juli -1 Agustus supaya dapat ikut sebagai peserta tambahan	TW III				
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Indeks Efektifitas KIE Tatap Muka tidak tercapai	Menerima saran dan masukan dari responden untuk pelaksanaan KIE tatap muka agar lebih menarik dan menjangkau lebih banyak peserta	Sepanjang tahun				
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kader keamanan pangan sekolah kurang responsif. Timeline kegiatan bersamaan dengan kegiatan akhir semester sehingga kader di sekolah sibuk.	Petugas aktif dalam membimbing dan mendampingi kader keamanan pangan.	TW III				
14	Jumlah desa pangan aman	Beberapa kader kurang responsif sehingga pelaksanaan kegiatan sedikit tertunda	Petugas aktif dalam membimbing dan mendampingi kader keamanan pangan.	TW III				
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Beberapa kader kurang responsif sehingga pelaksanaan kegiatan sedikit tertunda	Petugas aktif dalam membimbing dan mendampingi kader keamanan pangan.	TW III				
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Efisiensi anggaran menyebabkan UMKM yg didampingi hanya di dalam Kab. Merauke dan tidak dapat dilakukan di luar wilayah Kab. Merauke. Pelaku usaha kurang kooperatif saat pendampingan sehingga sulit untuk menyesuaikan waktu pendampingan. Beberapa pelaku usaha kesulitan biaya untuk pengujian produk risiko tinggi.	1) Fasilitator membantu langsung UMKM dalam pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi 2) Target direalisasikan sesuai SK pendampingan meskipun ada efisiensi anggaran. 3) Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk pendampingan agar dapat berjalan sesuai target.	Sepanjang tahun				

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM***		
						RENCANA AKSI YANG BELUM	TIMELINE	
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Belum ada sarana yang memenuhi unsur untuk di pro justitia	Melakukan operasi penindakan sesuai hasil wasmatlitrik TW II	TW III				
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Terdapat kesulitan dalam menelusuri alamat sarana untuk verifikasi hasil patroli siber.	Melaksanakan kegiatan patroli siber, profiling kejahatan, dan menindaklanjuti rekomendasi analisis kejahatan dari Direktorat Cegah Tangkal.	Sepanjang tahun				
19	Indeks Pelayanan Publik UPT	Pelayanan publik dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aspek pelayanan publik	Melaksanakan pelayanan publik dengan baik sesuai dengan aspek pelayanan publik	Sepanjang tahun				
20	Nilai AKIP UPT BPOM	Perencanaan, pelaporan, dan evaluasi dilaksanakan sesuai pedoman SAKIP.	Melaksanakan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai pedoman SAKIP	Sepanjang tahun				
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai IKPA masih memperhitungkan pagu blokir, sehingga nilai realisasi anggaran masih kecil.	Mengawal pelaksanaan anggaran agar sesuai target	Sepanjang tahun				
22	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Kurangnya <i>awareness</i> dari pegawai dalam penerapan manajemen risiko.	Melaksanakan bimtek sistem manajemen pengawasan obat dan makanan	TW III				
23	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Pelaporan disiplin, apel, gratifikasi dan benturan kepentingan telah dilaksanakan dan dilaporkan tepat waktu.	Melaksanakan pelaporan disiplin, apel, gratifikasi, dan benturan kepentingan tepat waktu	Sepanjang tahun				

Tabel 3. 21 Matriks Rekomendasi Hasil Evaluasi TW II

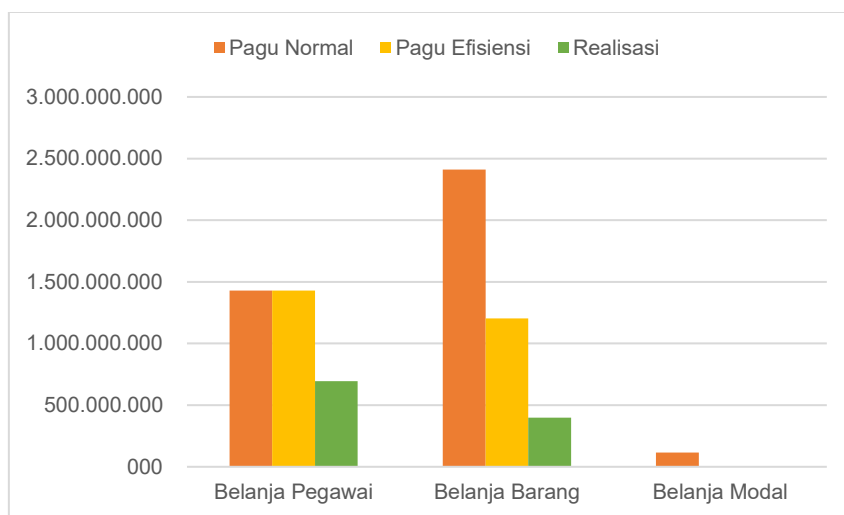
3.3. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 063.01.2.690476/2025 tanggal 02 Desember 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh pagu anggaran sebesar Rp3.927.558.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Namun, dari besaran pagu tersebut sebesar Rp1.320.426.000,- tidak dapat digunakan karena termasuk ke dalam anggaran yang diblokir secara mandiri dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025.

Berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA. 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke kembali melaksanakan pemblokiran anggaran secara mandiri sebesar Rp949.735.000,- pada belanja barang dan seluruh belanja modal sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dicairkan adalah sebesar Rp1.613.972.000,- atau sebesar 41,09% dari pagu anggaran awal.

Berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke mendapatkan relaksasi pemanfaatan blokir anggaran sebesar Rp293.546.000,- sehingga total blokir anggaran sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.320.426.000,-

Loka POM di Kabupaten Merauke telah menggunakan anggaran sebesar Rp1.093.103.366,- atau sebesar 27,83% dari jumlah pagu anggaran termasuk blokir mandiri. Apabila dikurangi dengan pagu anggaran yang diblokir untuk efisiensi anggaran maka Loka POM di Kabupaten Merauke telah merealisasikan 41,44% anggaran sampai dengan akhir triwulan II.



Gambar 3. 1 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Secara rinci, realisasi anggaran dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja, dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO.	KODE RO	URAIAN	VOLUME			ANGGARAN (Rp)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	6	42,85%	81.460.000	1.814.500	2,22%
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT	11	3	27,27%	81.316.000	2.550.000	3,13%
3	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	100	105,26%	75.857.000	8.253.500	10,8%
4	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	121.000.000	0	0
5	3165.BMB.001	Layanan informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	17	6	35,29%	28.650.000	6.691.996	23,35%
6	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	7	0	0	51.000.000	0	0
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	5	0	0	65.000.000	0	0
8	3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0	94.556.000	0	0
9	3165.QCD.U58	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Merauke	1	0	0	197.379.000	41.120.740	20,83%
10	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0	0	104.802.000	10.312.000	9,83%
11	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1	0	0	243.839.000	40.541.000	16,62%
12	3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0	126.798.000	14.769.000	11,64%
13	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	1	33,33%	21.614.000	3.656.500	16,91%
14	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang diperiksa oleh UPT	50	25	50%	32.900.000	11.047.800	33,57%

NO.	KODE RO	URAIAN	VOLUME			ANGGARAN (Rp)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
15	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT	78	32	41,02%	39.300.000	15.889.177	40,43%
16	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	14	5	35,71%	14.206.000	450.000	3,16%
17	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	117	53	45,29%	118.483.000	22.068.998	18,62%
18	6384.EBA.956	Layanan BMN	1	0	0	8.000.000	522.500	6,53%
19	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	0	2.421.398.000	913.415.655	37,72%

Tabel 3. 22 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Triwulan II 2025

Realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	204.889.000	19.228.397	9,38%
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	94.556.000	0	0
3	Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	579.946.000	20.863.000	3,60%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	21.614.000	1.350.000	6,25%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	197.379.000	440.000	0,22%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT	81.460.000	1.256.500	1,54%
7	Layanan publik UPT yang Prima	81.316.000	1.650.000	2,03%
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	2.666.398.000	446.886.103	16,76%

Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

3.3.1. Perhitungan Efisiensi Kinerja

Efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input. Di level UPT, capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan sedangkan

inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi dihitung dengan range berikut:

No.	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 3. 24 Range Tingkat Efisiensi

Perhitungan efisiensi kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke pada triwulan II 2025 sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	IE	TE	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	39.300.000	15.889.177	40,43%	81,25	99,44	122,39%	3,03	2,02	75% (tidak efisien)
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	14.805.000	4.971.510	33,58%	75	100	133,33%	3,97	2,97	75% (tidak efisien)
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	3.290.000	1.104.780	33,58%	100	100	100%	2,98	1,98	75% (tidak efisien)
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	14.805.000	4.971.510	33,58%	75	95	126,67%	3,77	2,77	75% (tidak efisien)
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	3.551.500	112.500	3,17%	60	27,78	46,30%	14,62	13,62	75% (tidak efisien)
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3.551.500	112.500	3,17%	100	0	0%	0	-1	Tidak efisien
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3.551.500	112.500	3,17%	85	100	117,65%	37,14	36,14	75% (tidak efisien)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAAN KINERJA	IE	TE	TINGKAT EFISIENSI
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59.241.500	11.034.499	18,63%	95,75	100	104,44%	5,61	4,61	75% (tidak efisien)
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59.241.500	11.034.499	18,63%	80	100	125%	6,71	5,71	75% (tidak efisien)
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	3.551.500	112.500	3,17%	91,20		108,94%	34,39	33,39	75% (tidak efisien)
Nilai Capaian SK 1		204.889.000	49.455.975	24,14%			98,47%	4,08	0,75	90% (efisien)
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	94.556.000	0	0%	10,67	10,67	100%	0	0	100% (efisien)
Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing Wilayah Kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104.507.000	14.945.496	14,30%	86,48	86,83	100,40%	7,02	6,02	75% (tidak efisien)
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	104.802.000	10.312.000	9,84%	75	75	100%	10,16	9,16	75% (tidak efisien)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	IE	TE	TINGKAT EFISIENSI
	Jumlah desa pangan aman	243.839.000	40.541.000	16,63%	75	75	100%	6,01	5,01	75% (tidak efisien)
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	126.798.000	14.769.000	11,65%	75	75	100%	8,59	7,59	75% (tidak efisien)
Nilai Capaian SK 3		579.946.000	80.567.496	13,89%			100.10%	7,21	0,86	88% (efisien)
Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	21.614.000	3.656.500	16,92%	50	60	120%	7.09	6,09	75% (tidak efisien)
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	197.379.000	41.120.740	20,83%	15	0	0%	0	-1	Tidak efisien
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	81.460.000	1.814.500	2,23%	50	50	100%	44,89	43,89	75% (tidak efisien)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	IE	TE	TINGKAT EFISIENSI
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	81.316.000	2.550.000	3,14%	0	0	0%	0	0	100% (Efisien)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	666.599.500	228.484.539	34,28%	0	0	0%	0	0	100% (Efisien)
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	666.599.500	228.484.539	34,28%	0	0	0%	0	0	100% (Efisien)
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	666.599.500	228.484.539	34,28%	0	0	0%	0	0	100% (Efisien)
	Persentase implelementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	666.599.500	228.484.539	34,28%	50	50	100%	0	0	100% (Efisien)
Nilai Capaian SK 8		2.666.398.000	913.938.155	34,28%			100%	2,92	1,91	75% (tidak efisien)

Tabel 3. 25 Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan 19 (sembilan belas) rincian output untuk mencapai target pada 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja dan 8 sasaran kegiatan. Dari perhitungan tingkat efisiensi yang telah dilakukan sampai dengan akhir periode triwulan II, 6 indikator kinerja dan 2 sasaran kegiatan termasuk ke dalam kategori efisien. Penjelasan tingkat efisiensi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 10 indikator kinerja memiliki tingkat efisiensi >1,81 dengan kategori capaian efisiensi “tidak efisien”. Namun jika dirata-ratakan tingkat efisiensi untuk sasaran kegiatan ini adalah 0,75 yang termasuk ke dalam kategori efisien.
2. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 indikator yaitu nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian kinerja 100% namun capaian anggaran 0% sehingga tingkat efisiensi termasuk dalam kategori “efisien”.
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 4 indikator kinerja yang berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi termasuk ke dalam kategori “efisien”.
4. Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu
Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan tingkat efisiensi termasuk ke dalam kategori “tidak efisien”.
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT yang tingkat efisiensinya termasuk ke dalam kategori “tidak efisien” karena sampai dengan akhir triwulan II belum ada realisasi kinerja dari indikator ini.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT
Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar yang capaian kinerjanya telah 100% namun termasuk ke dalam kategori “tidak efisien” karena capaian realisasi anggaran tidak sama dengan besaran capaian kinerja.
7. Layanan Publik UPT yang Prima
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 indikator yaitu indeks pelayanan publik UPT yang penilaiannya dilakukan secara tahunan sehingga nilai akan diketahui di TW IV. Sasaran kegiatan ini termasuk ke dalam kategori “efisien”.

8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 4 indikator kinerja yang 3 diantaranya dilakukan penilaian tahunan sehingga nilai akan diperoleh di TW IV. Sedangkan 1 indikator lain yaitu persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT memperoleh capaian kinerja 100% pada triwulan II. Sasaran kegiatan ini termasuk ke dalam kategori “tidak efisien” karena belum ada realisasi kinerja yang dapat dihitung mengingat nilai dari 3 indikator akan diketahui di TW IV 2025.

3.4. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang berdampak pada penyesuaian dan perbaikan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja yang lebih baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Informasi kinerja pada laporan kinerja interim ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Sebagai bahan evaluasi untuk pencapaian kinerja di periode berikutnya. Dengan adanya informasi berupa kendala dan tindak lanjut dalam pencapaian kinerja triwulan II dapat dilaksanakan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti kendala yang ditemukan agar tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai target kinerja sesuai yang diharapkan.
2. Informasi kinerja yang termuat dalam laporan kinerja interim dapat membantu dalam penyusunan perencanaan kinerja untuk periode berikutnya sebagai bahan masukan dan dasar penentuan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai target kinerja.
3. Laporan kinerja interim merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran oleh Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai pelayan publik unit pelaksana teknis BPOM di daerah Papua Selatan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan terhadap capaian setiap indikator dan sasaran kegiatan, nilai kinerja organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Merauke pada triwulan II tahun 2025 adalah 90% dengan predikat baik.
2. Dari perbandingan capaian kinerja triwulan II dengan target tahunan, 4 sasaran kegiatan termasuk ke dalam kategori tercapai/melampaui, 1 sasaran kegiatan termasuk dalam kategori akan tercapai, dan 3 sasaran kegiatan termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras.
3. Dari hasil perhitungan capaian tingkat efisiensi, 18 indikator kinerja pada triwulan II termasuk ke dalam kategori tidak efisien karena beberapa indikator belum memiliki realisasi anggaran sedangkan 5 indikator termasuk ke dalam kategori efisien.

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kinerja periode triwulan II tahun 2025, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke untuk periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan agar realisasi capaian kinerja maksimal dengan penyerapan anggaran yang optimal dan efisien.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan.
3. Berkoordinasi aktif dengan unit pengampu di internal BPOM serta lintas sektor di eksternal agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
MERAUKE

NOMOR HK.02.02.30C.10.24.41 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
MERAUKE

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN MERAUKE



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE

NOMOR HK.02.02.30C.10.24.41 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN MERAUKE

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi pengawasan lintas sektor hasil oleh	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93,01
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	65
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
10	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,29
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	84,99
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MERAUKE



MINARTO



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MINARTO

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Merauke

MINARTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.25 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.2 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.48 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Persentase
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Persentase
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	74.29 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,927,558,000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,498,160,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,429,398,000

Merauke, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Merauke



MINARTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

[illegible]

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN								SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			oleh UPT					makanan dan bahan berbahaya								
2.	03 - Memuatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				1	3	3	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	11	94,556,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				C - Kalibrasi Alat Laboratorium				3,000,000	3,000,000			
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				B - Pengadaan Tes Kit dan Perlengkapan Laboratorium				51,936,000	51,936,000			
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				A - Pengadaan Bahan K3				1,500,000	1,500,000			
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				C - Pengawasan Food Security dalam Rangka Kunjungan RI 1 dan RI 2				5,300,000	5,300,000			
		5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				B - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai POM dan Loka POM dalam Pengujian Obat Tradisional				16,410,000	16,410,000			
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				A - Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia Kosmetik untuk Balai POM dan Loka POM				16,410,000	16,410,000			
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT				86.48	86.48	86.48	86.48	86.48	86.48	86.48	86.48	86.48	86.48	104,507,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				A - Pelaksanaan Sosialisasi/Publikasi/Edukasi Masyarakat				28,650,000	28,650,000			
		2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				A - PENYEBARAN INFORMASI PRODUK TERAPETIK, OT, KOSMETIK, PRODUK KOMPLEMEN DAN BAHAN BERBAHAYA				16,417,000	16,417,000			
		3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				B - Pameran Obat dan Makanan				9,600,000	9,600,000			
		4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				C - Operasional Sentra Informasi Keracunan (SIKER)				1,800,000	1,800,000			
		5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				D - Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan				1,000,000	1,000,000			
		6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				E - Pelatihan Pelayanan Publik				11,760,000	11,760,000			
		7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				F - Workshop Informasi Dan Komunikasi				11,760,000	11,760,000			
		8.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				G - Workshop KIE dan Pelayanan Pengaduan				11,760,000	11,760,000			
		9.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				H - Meet the Admins				11,760,000	11,760,000			
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			25	25	50	75	75	100	100	100	100	100	2	104,802,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																																																																																																																																			
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																																																																																																																				
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="8">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman</td><td>051 - Koordinasi lintas sektor</td><td colspan="8">A - Koordinasi Lintas Sektor</td><td>1,350,000</td><td>1,350,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman</td><td>051 - Koordinasi lintas sektor</td><td colspan="8">B - Advokasi Lintas Sektor PJAS</td><td>24,790,000</td><td>24,790,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman</td><td>052 - Intervensi keamanan PJAS</td><td colspan="8">A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS SEKOLAH</td><td>33,700,000</td><td>33,700,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman</td><td>052 - Intervensi keamanan PJAS</td><td colspan="8">B - BIMBINGAN TEKNIK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH</td><td>2,530,000</td><td>2,530,000</td></tr><tr><td>5.</td><td>DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman</td><td>052 - Intervensi keamanan PJAS</td><td colspan="8">C - PEMBERIAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN</td><td>9,320,000</td><td>9,320,000</td></tr><tr><td>6.</td><td>DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman</td><td>052 - Intervensi keamanan PJAS</td><td colspan="8">D - MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN KADER KPJAS</td><td>3,400,000</td><td>3,400,000</td></tr><tr><td>7.</td><td>DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman</td><td>052 - Intervensi keamanan PJAS</td><td colspan="8">E - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN</td><td>29,712,000</td><td>29,712,000</td></tr></table>															NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - Koordinasi Lintas Sektor								1,350,000	1,350,000	2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	B - Advokasi Lintas Sektor PJAS								24,790,000	24,790,000	3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS SEKOLAH								33,700,000	33,700,000	4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMBINGAN TEKNIK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH								2,530,000	2,530,000	5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - PEMBERIAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN								9,320,000	9,320,000	6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN KADER KPJAS								3,400,000	3,400,000	7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	E - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN								29,712,000	29,712,000																										
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																																																																																				
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - Koordinasi Lintas Sektor								1,350,000	1,350,000																																																																																																																																				
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	B - Advokasi Lintas Sektor PJAS								24,790,000	24,790,000																																																																																																																																				
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS SEKOLAH								33,700,000	33,700,000																																																																																																																																				
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMBINGAN TEKNIK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH								2,530,000	2,530,000																																																																																																																																				
		5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - PEMBERIAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN								9,320,000	9,320,000																																																																																																																																				
		6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN KADER KPJAS								3,400,000	3,400,000																																																																																																																																				
		7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	E - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN								29,712,000	29,712,000																																																																																																																																				
		03 - Jumlah desa pangan aman				27	50	75	75	100	100	100	100	100	1	243,839,000																																																																																																																																		
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="8">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="8">A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR</td><td>1,350,000</td><td>1,350,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="8">C - PENGAMBILAN DATA/SURVEI PRE DAN POST INTERVENSI DESA PANGAN AMAN</td><td>12,100,000</td><td>12,100,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="8">D - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA</td><td>25,610,000</td><td>25,610,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="8">E - BIMTEK KOMUNITAS DESA</td><td>45,120,000</td><td>45,120,000</td></tr><tr><td>5.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="8">F - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DESA</td><td>14,940,000</td><td>14,940,000</td></tr><tr><td>6.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="8">G - FASILITASI KP BAGI KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA</td><td>5,207,000</td><td>5,207,000</td></tr><tr><td>7.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="8">H - MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DESA PANGAN AMAN</td><td>65,178,000</td><td>65,178,000</td></tr><tr><td>8.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="8">I - MONITORING DAN EVALUASI 3 KEGIATAN PRO PN</td><td>29,514,000</td><td>29,514,000</td></tr><tr><td>9.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="8">B - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA</td><td>44,820,000</td><td>44,820,000</td></tr></table>															NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR								1,350,000	1,350,000	2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	C - PENGAMBILAN DATA/SURVEI PRE DAN POST INTERVENSI DESA PANGAN AMAN								12,100,000	12,100,000	3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	D - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA								25,610,000	25,610,000	4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	E - BIMTEK KOMUNITAS DESA								45,120,000	45,120,000	5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	F - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DESA								14,940,000	14,940,000	6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	G - FASILITASI KP BAGI KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA								5,207,000	5,207,000	7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	H - MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DESA PANGAN AMAN								65,178,000	65,178,000	8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	I - MONITORING DAN EVALUASI 3 KEGIATAN PRO PN								29,514,000	29,514,000	9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA								44,820,000	44,820,000
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																																																																																				
		1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR								1,350,000	1,350,000																																																																																																																																				
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	C - PENGAMBILAN DATA/SURVEI PRE DAN POST INTERVENSI DESA PANGAN AMAN								12,100,000	12,100,000																																																																																																																																				
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	D - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA								25,610,000	25,610,000																																																																																																																																				
		4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	E - BIMTEK KOMUNITAS DESA								45,120,000	45,120,000																																																																																																																																				
		5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	F - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DESA								14,940,000	14,940,000																																																																																																																																				
		6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	G - FASILITASI KP BAGI KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA								5,207,000	5,207,000																																																																																																																																				
		7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	H - MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DESA PANGAN AMAN								65,178,000	65,178,000																																																																																																																																				
		8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	I - MONITORING DAN EVALUASI 3 KEGIATAN PRO PN								29,514,000	29,514,000																																																																																																																																				
		9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA								44,820,000	44,820,000																																																																																																																																				
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				30	50	75	75	100	100	100	100	100	1	126,798,000																																																																																																																																		
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="8">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</td><td>053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya</td><td colspan="8">A - SURVEI PASAR</td><td>2,100,000</td><td>2,100,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</td><td>053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya</td><td colspan="8">B - ADVOKASI PEMDA DAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS</td><td>25,654,000</td><td>25,654,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</td><td>053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya</td><td colspan="8">C - BIMBINGAN TEKNIK PETUGAS PENGELOLA PASAR DAN PELATIHAN FASILITATOR PASAR</td><td>65,196,000</td><td>65,196,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</td><td>053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya</td><td colspan="8">D - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR DAN KAMPANYE PASAR AMAN</td><td>24,732,000</td><td>24,732,000</td></tr><tr><td>5.</td><td>DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</td><td>053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya</td><td colspan="8">E - KAMPANYE KEAMANAN PANGAN DI PASAR</td><td>2,916,000</td><td>2,916,000</td></tr></table>															NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - SURVEI PASAR								2,100,000	2,100,000	2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - ADVOKASI PEMDA DAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS								25,654,000	25,654,000	3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - BIMBINGAN TEKNIK PETUGAS PENGELOLA PASAR DAN PELATIHAN FASILITATOR PASAR								65,196,000	65,196,000	4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	D - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR DAN KAMPANYE PASAR AMAN								24,732,000	24,732,000	5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	E - KAMPANYE KEAMANAN PANGAN DI PASAR								2,916,000	2,916,000																																																				
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																																																																																				
		1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - SURVEI PASAR								2,100,000	2,100,000																																																																																																																																				
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - ADVOKASI PEMDA DAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS								25,654,000	25,654,000																																																																																																																																						
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - BIMBINGAN TEKNIK PETUGAS PENGELOLA PASAR DAN PELATIHAN FASILITATOR PASAR								65,196,000	65,196,000																																																																																																																																						
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	D - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR DAN KAMPANYE PASAR AMAN								24,732,000	24,732,000																																																																																																																																						
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	E - KAMPANYE KEAMANAN PANGAN DI PASAR								2,916,000	2,916,000																																																																																																																																						

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	diselesaikan sesuai standar													
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		E - Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan		10,700,000		10,700,000				
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		F - Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan PPNS Badan POM		10,700,000		10,700,000				
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		G - Supervisi dan Bantuan Teknis Kegiatan Intelijen		10,700,000		10,700,000				
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan		A - Perencanaan Penyusunan Analisis		1,500,000		1,500,000				
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penjejakn Digital Kejahatan Obat dan Makanan		A - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan		789,000		789,000				
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penjejakn Digital Kejahatan Obat dan Makanan		B - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan		3,600,000		3,600,000				
		7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		A - Pertemuan Peningkatan Kinerja Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM		10,900,000		10,900,000				
		8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		B - Forum Koordinasi Intelejen di Mataram		10,900,000		10,900,000				
		9.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		C - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		10,900,000		10,900,000				
		10.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		D - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan di Jawa Barat		10,771,000		10,771,000				
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.75	81,316,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi		A - Audit Sarana/ Pendampingan dalam Rangka Sertifikasi		37,906,000		37,906,000				
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik		A - Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator		11,130,000		11,130,000				
		3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik		B - Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam		10,760,000		10,760,000				
		4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik		C - Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Kosmetik		10,760,000		10,760,000				
		5.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik		D - Forum Komunikasi Fasilitator UMKM Obat Bahan Alam		10,760,000		10,760,000				
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												74.29	666,599,500
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - Langganan Daya dan Jasa		86,400,000		21,600,000				
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		C - SOSIALISASI PERATURAN BAGI PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		10,203,000		2,550,750				
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		A - RAPAT EVALUASI NASIONAL BADAN POM TAHUN 2024		10,203,000		2,550,750				
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		B - PENYUSUNAN LK BPOM (UNAUDITED)		10,203,000		2,550,750				
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		D - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS BPOM) TAHUN 2025		10,353,000		2,588,250				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				E - BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2025-2029							10,304,000	2,576,000
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				F - BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI							12,693,000	3,173,250
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				G - RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PERKUATAN SDM UNGGUL							16,399,000	4,099,750
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				I - BIMBINGAN TEKNIK UKPBJ BADAN POM TA 2025							10,083,000	2,520,750
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				H - WORKSHOP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (Digitalisasi Arsip Menuju IKN)							10,203,000	2,550,750
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				J - BIMTEK PENGELOLAAN BMN							10,203,000	2,550,750
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				K - RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN POM							10,153,000	2,538,250
		13.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran							51,000,000	12,750,000
		14.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Alat Pengolah Data							65,000,000	16,250,000
		15.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Penatausahaan Barang Milik Negara							8,000,000	2,000,000
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Gaji dan Tunjangan							1,423,151,000	355,787,750
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - Operasional Perkantoran dan Pimpinan							457,215,000	114,303,750
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Koordinasi/Advokasi/Supervisi							359,832,000	89,958,000
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - Perawatan Gedung Kantor							36,600,000	9,150,000
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam							58,200,000	14,550,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM													4	666,599,500
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				K - RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN POM							10,153,000	2,538,250
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - Operasional Perkantoran dan Pimpinan							457,215,000	114,303,750
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				D - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS BPOM) TAHUN 2025							10,353,000	2,588,250
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				G - RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PERKUATAN SDM UNGGUL							16,399,000	4,099,750
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				C - SOSIALISASI PERATURAN BAGI PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR							10,203,000	2,550,750
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				B - PENYUSUNAN LK BPOM (UNAUDITED)							10,203,000	2,550,750
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				I - BIMBINGAN TEKNIK UKPBJ BADAN POM TA 2025							10,083,000	2,520,750
		8.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Alat Pengolah Data							65,000,000	16,250,000
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				A - RAPAT EVALUASI NASIONAL BADAN POM TAHUN 2024							10,203,000	2,550,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		10.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Penatausahaan Barang Milik Negara							8,000,000	2,000,000
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				J - BIMTEK PENGELOLAAN BMN							10,203,000	2,550,750
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - Perawatan Gedung Kantor							36,600,000	9,150,000
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				E - BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2025-2029							10,304,000	2,576,000
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				E - Langganan Daya dan Jasa							86,400,000	21,600,000
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				F - BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI							12,693,000	3,173,250
		16.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran							51,000,000	12,750,000
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				H - WORKSHOP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (Digitalisasi Arsip Menuju IKN)							10,203,000	2,550,750
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Koordinasi/Advokasi/Supervisi							359,832,000	89,958,000
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam							58,200,000	14,550,000
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Gaji dan Tunjangan							1,423,151,000	355,787,750
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													2.8	666,599,500
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam							58,200,000	14,550,000
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				J - BIMTEK PENGELOLAAN BMN							10,203,000	2,550,750
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				H - WORKSHOP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (Digitalisasi Arsip Menuju IKN)							10,203,000	2,550,750
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - Operasional Perkantoran dan Pimpinan							457,215,000	114,303,750
		5.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Penatausahaan Barang Milik Negara							8,000,000	2,000,000
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				G - RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PERKUATAN SDM UNGGUL							16,399,000	4,099,750
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Gaji dan Tunjangan							1,423,151,000	355,787,750
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				D - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS BPOM) TAHUN 2025							10,353,000	2,588,250
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				B - PENYUSUNAN LK BPOM (UNAUDITED)							10,203,000	2,550,750
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				A - RAPAT EVALUASI NASIONAL BADAN POM TAHUN 2024							10,203,000	2,550,750
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				E - Langganan Daya dan Jasa							86,400,000	21,600,000
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - Perawatan Gedung Kantor							36,600,000	9,150,000
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				F - BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI							12,693,000	3,173,250
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				K - RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN POM							10,153,000	2,538,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		15.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Alat Pengolah Data							65,000,000	16,250,000
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				I - BIMBINGAN TEKNIK UKPBJ BADAN POM TA 2025							10,083,000	2,520,750
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				E - BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2025-2029							10,304,000	2,576,000
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				C - SOSIALISASI PERATURAN BAGI PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR							10,203,000	2,550,750
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Koordinasi/Advokasi/Supervisi							359,832,000	89,958,000
		20.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran							51,000,000	12,750,000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		4	8	25	29	33	50	54	58	75	79	83	100	666,599,500
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				C - SOSIALISASI PERATURAN BAGI PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR							10,203,000	2,550,750
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Koordinasi/Advokasi/Supervisi							359,832,000	89,958,000
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				I - BIMBINGAN TEKNIK UKPBJ BADAN POM TA 2025							10,083,000	2,520,750
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				G - RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PERKUATAN SDM UNGGUL							16,399,000	4,099,750
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				F - BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI							12,693,000	3,173,250
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				E - BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2025-2029							10,304,000	2,576,000
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				D - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS BPOM) TAHUN 2025							10,353,000	2,588,250
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				B - PENYUSUNAN LK BPOM (UNAUDITED)							10,203,000	2,550,750
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				A - RAPAT EVALUASI NASIONAL BADAN POM TAHUN 2024							10,203,000	2,550,750
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - Perawatan Gedung Kantor							36,600,000	9,150,000
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				E - Langganan Daya dan Jasa							86,400,000	21,600,000
		12.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Alat Pengolah Data							65,000,000	16,250,000
		13.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Penatausahaan Barang Milik Negara							8,000,000	2,000,000
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam							58,200,000	14,550,000
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Gaji dan Tunjangan							1,423,151,000	355,787,750
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				H - WORKSHOP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (Digitalisasi Arsip Menuju IKN)							10,203,000	2,550,750
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - Operasional Perkantoran dan Pimpinan							457,215,000	114,303,750
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat	052 - Pelaksanaan koordinasi				J - BIMTEK PENGELOLAAN BMN							10,203,000	2,550,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI		
			dan Makanan													
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		K - RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN POM							10,153,000	2,538,250		
		20.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran							51,000,000	12,750,000		
													Total	3,927,558,000		

Merauke, 23 June 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke,



MINARTO